



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: No.3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V2020

**Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Program
Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
di Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota
Bandung**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Dwi Putra Satria Anugerah

2016310060

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: No.3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V2020

**Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Inovasi
Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan
Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung**

Skripsi

Oleh

Dwi Putra Satria Anugerah

2016310060

Pembimbing

Trisno Sakti Herwanto, SIP., MPA

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Dwi Putra Satria Anugerah
Nomor Pokok : 2016310060
Judul : Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Inovasi
Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Cibuntu,
Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 5 Agustus 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D. : _____

Sekretaris

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. : _____

Anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Putra Satria Anugerah

NPM : 2016310060

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat dari pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Penyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian haru diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar

Bandung, 8 Juli 2021



(Dwi Putra Satria Anugerah)

LEMBAR PLAGIARISME

Draft Skripsi

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

13 %
INTERNET SOURCES

4 %
PUBLICATIONS

15 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sogang University Student Paper	9 %
2	repository.unpar.ac.id Internet Source	3 %
3	peraturan.go.id Internet Source	1 %
4	Submitted to Catholic University of Parahyangan Student Paper	1 %
5	fr.scribd.com Internet Source	1 %
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
7	ms.wikipedia.org Internet Source	<1 %
8	humas.bandung.go.id Internet Source	<1 %
9	justice-project.org Internet Source	<1 %

ABSTRAK

Nama : Dwi Putra Satria Anugerah

NPM : 201310060

Judul : Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bandung membentuk Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Meskipun PIPPK dirancang sebagai program partisipatif, terdapat indikasi permasalahan hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut berupa kontribusi swadaya masyarakat dan komitmen antar partisipan yang belum terwujud terkait partisipasi program.

Untuk mengetahui hambatan partisipasi dalam program PIPPK. Digunakan Model CLEAR dalam penelitian ini yang memiliki 5 dimensi yaitu 1) *Can do*; 2) *Like to*; 3) *Enabled to*; 4) *Asked to*; dan 5) *Responded to*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif deskriptif. Kedalaman informasi diperoleh melalui wawancara dengan berbagai aktor yang terkait dengan program PIPPK antara lain Lurah Cibuntu, pegawai Kelurahan Cibuntu, Ketua RW, partisipan program dan non partisipan program.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah hambatan partisipan dalam program PIPPK. Hambatan pertama partisipasi pada program PIPPK yaitu keterbatasan swadaya masyarakat terutama terkait dengan dukungan pembiayaan program. Hambatan partisipasi kedua adalah kurangnya komitmen masyarakat terhadap program karena keterbatasan informasi yang diperoleh. Hambatan partisipasi ketiga yaitu kendala proses komunikasi antara partisipan dan pemerintah yang lambat. Hambatan keempat yaitu keterbatasan pelibatan seluruh masyarakat pada program. Hambatan partisipan yang terakhir yaitu responsivitas dari kelurahan yang cenderung rendah dalam menanggapi keluhan partisipan.

Kata Kunci: Hambatan Partisipasi, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), CLEAR

ABSTRACT

Name : Dwi Putra Satria Anugerah

NPM : 201310060

Title : Obstacle to Community Participation in the PIPPK Cibuntu Town, Bandung
Kulon District, Bandung City)

In 2015, the Bandung City Government established the Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK). This program aims to increase community participation in the planning and implementation process of development. Although PIPPK is designed as participatory program, there are indications of problem with obstacles to community participation in the implementation of the program in the form of community self-help contributions and unrealized commitments among participants regarding program participation.

To find out the obstacle to participation problems in the PIPPK program, the CLEAR model is used in this study which has 5 dimensions, namely 1) Can do; 2) Like to; 3) Enabled to; 4) Asked to; and 5) Responded to. The research method used in this research is descriptive qualitative method. The depth of information was obtained through interviews with various actors related to the PIPPK Program, including the Cibuntu Village employees, RW heads, program participants and non-program participants.

The result of the study indicates that there are a number of obstacle to participants in the PIPPK program. 1) The first obstacle to participation in the PIPPK program is the limitations of community self-help, especially related to program financing support 2) The second obstacle to participation is the lack of community commitment to the program due to limited information obtained 3) Barrier to participation is the slow communication process between participants and the government. 4) Obstacles is the limited involvement of the people the entire community in the program 5) The last participant barrier was the responsiveness of the kelurahan which tended to be low in responding to participant complaints.

Keyword: Participation Obstacle, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Kewilayahan (PIPPK), CLEAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilyahan (PIPPK) dengan Menggunakan Model *CLEAR* Studi Kasus : Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon. Skripsi menjadi syarat wajib bagi setiap mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial. Oleh karena itu peneliti mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Keluarga yaitu kedua orang tua dan saudara yang senantiasa mendukung dalam proses penulisan skripsi ini,
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian Skripsi,
3. Mas Trisno Sakti Herwanto, SIP., MPA. Selaku Kaprodi dan sekaligus dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini,
4. Ibu Indraswari, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian Skripsi
5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahnyangan Bandung karena telah mengajar dan memberikan banyak ilmu bermanfaat bagi

peneliti sepanjang perkuliahan.

6. Pihak Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung selaku pemberi izin penelitian di Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon
7. Pak Teguh selaku Lurah, Pak Anwar selaku pegawai Kelurahan Cibuntu dan Ketua RW 07 yang telah bersedia memberikan informasi.
8. Rivelda, Sandra dan Tanti selaku teman seperbimbingan yang telah membantu dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Rezaki, Adib, Wina, Sihol, Dayva, Ida, Patrik, Daniel dan Riyo serta Teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Publik seperjuangan yang mempunyai kesan yang manis selama berkuliah di Unpar
10. Aska, Rafli, Bebe dan Peggy teman-teman di masa SMA yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandung, Juli 2020

Penulis,

Dwi Putra Satria Anugrah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.3 Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Manfaat Teoritis	12
1.3.2 Manfaat Praktis.....	12
1.4 Sistemika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14

2.1 Program Sektor Publik	14
2.2 Partisipasi Program.....	15
2.3 Hambatan Partisipasi Program	17
2.4 Analisis Hambatan Partisipasi Program dengan Model CLEAR	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Tipe Penelitian.....	24
3.2 Peran Peneliti.....	26
3.3 Lokasi Penelitian	26
3.4 Prosedur Pengumpulan Data	27
3.5 Analisis Data	29
3.6 Keabsahan Data.....	30
3.7 Operasionalisasi Variabel.....	31
BAB IV PROFIL PENELITIAN	34
4.1 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	34
4.1.2 Tujuan Pogram PIPPK.....	35
4.1.3 Sasaran Program	35
4.1.4 Prinsip – Prinsip PIPPK.....	36
4.1.5 Tipe Swakeola.....	37

4.1.6 Jenis Kegiatan PIPPK	38
4.2. Definisi Konsep-Konsep yang Digunakan Dalam Program	38
4.2.1 Partisipatif	38
4.2.2 Swadaya Masyarakat.....	38
4.2.3 Kelurahan	39
4.2.4 Rukun Warga (RW).....	39
4.3 Profil Pengelola Program PIPPK	39
4.3.1 Bagan pengelola Program PIPPK.....	39
4.4 Data Statis.....	40
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	41
5.1 Can Do dapat dilakukan (Keterampilan dan Sumberdaya ketika Berpartisipasi)	42
5.1.1 Kemampuan Partisipan Dalam Menyampaikan Aspirasi Data	42
5.1.2 Partisipan Mampu Mengajak Partisipan Lain Untuk Terlibat	44
5.1.3 Latar Belakang Pendidikan yang Dimiliki Partisipan.....	46
5.1.4 Ketersediaan Partisipan dalam Memberikan Sumbangan (tenaga kerja, uang dan bahan bangunan) untuk kebutuhan program.....	48
5.2 <i>Like to</i> (Ingin Melakukan) Ketertarikan partisipasi program	51

5.2.1 Tedapat Komitmen Bersama/ Rasa Keterikatan sesama partisipan untuk tetap terlibat dalam Program	51
5.2.2 Partisipan Merasa Menjadi Bagian Program	53
5.3 Enabled to digunakan untuk (Ketersediaan Kelembagaan untuk berpartisipasi)	55
5.3.1 Ketersediaan Mekanisme Kelembagaan bagi partisipan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.....	55
5.4 <i>Asked to</i> Diminta untuk (dorongan Eksternal partisipan untuk terlibat dalam program	58
5.4.1 Partisipan berpartisipasi dikarenakan adanya permintaan partisipan lain agar terlibat dalam program	58
5.4.2 Partisipan ingin berpartisipasi dikarenakan adanya imbalan yang diberikan	60
5.4.3 Adanya kondisi tertentu yang dialami partisipan, sehingga mereka tetap terdorong untuk berpartisipasi pada program.....	62
5.5 <i>Responded to</i> Di tanggap (Responsivitas Partisipan ditanggapi oleh Wakil Program (RW dan Kelurahan).....	63
5.5.1 Tanggapan partisipan ditindaklanjuti, ditampung atau tidak ditanggapi oleh wakil program (RW dan Kelurahan)	63
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	67

6.1 Kesimpulan.....	67
6.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1.1.Perbedaan Alur/tahapan Tipe I dan Tipe IV Berdasarkan Perwal Kota Bandung Nomor 436 Tahun 2015.....	4
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jenis Kegiatan PIPPK	7
Gambar 4.1 Struktur Pengelola Program PIPPK	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU 23 tahun 2014 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹. Oleh sebab itu inti dari UU tersebut menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan berupa hak dan kewajiban untuk membangun kemajuan daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan wilayah tersebut.

Di era otonomi daerah ini pemerintah ditingkat lokal memiliki kewenangan untuk membuat program, menginisiasi program atau bahkan berinovasi dengan membuat berbagai program. Saat ini proses penentuan program pembangunan bahkan telah dimulai dari tingkat yang paling bawah. Hal tersebut dibuktikan oleh inisiasi Pemerintah Kota Bandung yang meluncurkan program inovasi ditingkat kelurahan yaitu PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Kewilayahan).

PIPPK merupakan program yang menjadi unggulan dari Kota Bandung yang direalisasikan sejak tahun 2015 yang sudah dilaksanakan di 30 kecamatan yang di dalamnya terdiri dari 151 kelurahan.² Program ini dimulai pada masa kepemimpinan

¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2014

² Peraturan Wali Kota Nomor 015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Walikota Bandung, Ridwan Kamil. PIPPK diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kembali rasa kebersamaan serta gotong royong pada tingkat Kelurahan.

Tujuan dari PIPPK yaitu mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dimulai pada tahap perencanaan sampai pelaksanaan karena pada hakekatnya diorientasikan pada pembangunan masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif, pemberdayaan dan inovasi program berdasarkan sumber daya dan kemampuan masyarakat yang didukung dengan peran Kelurahan sebagai pendamping dan pengawas program.³

Pelaksanaan proram PIPPK diterapkan melalui *Bottom-up*. *Bottom-up* yaitu proses yang dimulai dari tingkat bawah yaitu masyarakat sampai ketinggian yang paling atas yaitu perangkat daerah. Proses awal melalui tahap perencanaan melakukan pembahasan melalui musyawarah atau rembuk warga yang menghasilkan kemufakatan atau kesepakatan bersama. Dalam hal ini masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam memberikan usulan program terkait dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dilingkungannya.

³ Akbar Idil, *Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Lokal: Studi Di Kota Bandung*, Jurnal Reformasi Administrasi Vol 5, No. 2, September 2018, dikutip pada 7 maret 2021 , Hal 102

Dalam penyelenggaraan PIPPK yang berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (juknis) di jelaskan terdapat 2 bentuk tipe swakelola yang dapat dilaksanakan oleh kelurahan yaitu Tipe I dan Tipe IV berikut penjelasannya

- a. Tipe I yaitu program dikelola, direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perangkat Daerah/Camat/Lurah Penanggung jawab anggaran.
- b. Tipe IV yaitu program dikelola dan direncanakan oleh Camat dan Lurah sebagai penanggung jawab anggaran dan berdasarkan usulan masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola⁴

Berdasarkan kedua tipe diatas, pemerintah Kota Bandung memperbolehkan setiap wilayah untuk menggunakan tipe mana yang sesuai dengan dinamika wilayahnya, hal ini seperti yang dikatakan Kamalia dari Pemerintah Kota Bandung dalam artikel Prokopim Kota Bandung bahwa *“Aturan ini mengakomodasi dinamika yang tumbuh dan berkembang di kewilayahan sehingga tidak saklek membuat norma baru, tapi*

⁴ Peraturan Wali Kota Nomor 015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

mengakomodasi dinamika di lapangan. Bagi yang sudah nyaman dengan swakelola tipe I, kami persilakan. Bagi yang sudah melaksanakan swakelola tipe IV”⁵

Secara lebih sederhana, PIPPK tipe I dan IV dibedakan berdasarkan partisipasi pada alur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Untuk mempermudah penjelasan mengenai perbedaan tersebut, ditampilkan tabel perbedaan PIPPK tipe I dan tipe IV sebagai berikut:

Tabel.1.1.Perbedaan Alur/tahapan Tipe I dan Tipe IV Berdasarkan Perwal Kota Bandung Nomor 436 Tahun 2015

NO	TAHAPAN PROGRAM	PERBEDAAN PARTISIPASI	
		TIPE I	TIPE IV
1	Perencanaan	✓	✓
2	Pelaksanaan	✓	✓
3	Pengawasan		✓
4	Pelaporan		✓

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbedaan partisipasi yang diatur kedalam kedua tipe tersebut, pada tipe I keterlibatan masyarakat hanya dalam proses tahap program perencanaan dan pelaksanaan saja, sedangkan pada Tipe IV Keterlibatan masyarakat secara keseluruhan mengikuti semua tahapan pada program yang sudah ditentukan. Berikut dibawah ini penjelasan tentang alur tahapan PIPPK:

⁵ Prokopim Kota Bandung, *Pola Swakelola akan Lebih Memberdayakan Masyarakat*, Kota Bandung : Humas.go.id, ditulis tanggal Senin, 2 april 2018, dikutip pada 21april 2021, <https://humas.bandung.go.id/berita/pola-swakelola-akan-lebih-memberdayakan-masyarakat>

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam program ini. Sosialisasi dan perancangan program dilakukan oleh RW, Karang taruna, PKK dan LPM. Pada tahap pihak kelurahan mengadakan rembuk warga bersama perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan RW dan beberapa perwakilan masyarakat. Pada tahap perencanaan terdapat musyawarah pembangunan yang menghasilkan usulan yang kemudian di rekapitulasi oleh pemerintah setempat. Hasil rekapitulasi tersebut kemudian menghasilkan dokumen pelaksanaan anggaran. Dana alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung adalah sebesar Rp. 100.000.000/RW. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur, kegiatan sosial dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.

2. Tahap Pelaksanaan dan Pengendalian

Pada tahap ini sesuai dengan yang sudah direncanakan dan dimusyawarahkan pada tahap perencanaan, kegiatan pelaksanaan PIPPK pun dilakukan pada lingkup kegiatannya yaitu sesuai dengan kebutuhan yang sudah diputuskan sebelumnya, kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan sosial dan ekonomi serta penguatan kelembagaan.

3. Tahap Evaluasi dan Monitoring

Tahap ini dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dalam PIPPK dilaksanakan. Pengawasan atau monitoring dilakukan oleh pihak Pemkot Bandung kepada setiap kelurahan dengan cara observasi hasil pelaksanaan kegiatan PIPPK. Proses selanjutnya yaitu membandingkan realisasi kegiatan terhadap anggaran yang diajukan agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana atau korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga masyarakat.

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan, pencapaian target, permasalahan yang dihadapi setiap tahapan dari pelaksanaan PIPPK.

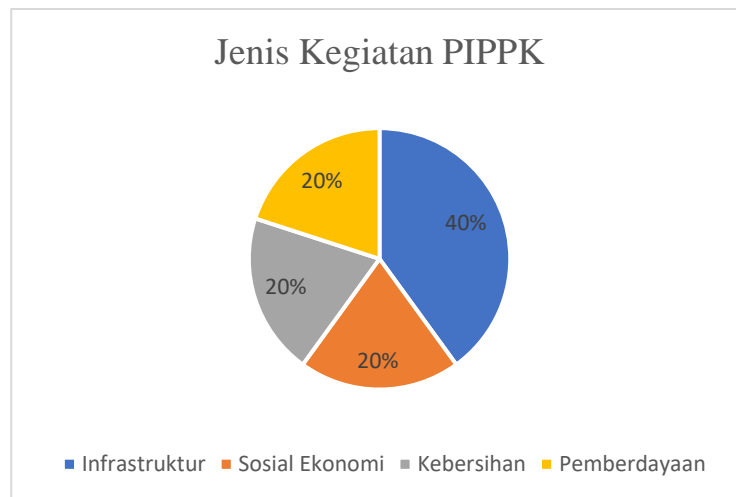
Pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada Kelurahan yang mengikuti program PIPPK, terdapat beberapa kategori seperti kategori realisasi yang diraih oleh Kelurahan Sukabungah, kategori kolaborasi oleh Kelurahan Babakan Ciparay, kategori inovasi oleh Kelurahan Buah Batu dan kategori partisipasi diraih oleh Kelurahan Cibuntu⁶. Kelurahan Cibuntu meraih apresiasi terbaik dalam kategori partisipasi. Hal menariknya tipe swakelola yang dipilih dan dijalankan di kelurahan

⁶ Andryan, *Kecamatan Sukajadi, Bandung Kulon, Babakan Ciparay dan Lengkong Dianugerahi PIPPK Awards*, Humas Kota Bandung 13 September 2018, dikutip pada tanggal 9 maret 2021

Cibuntu adalah tipe 1 yang mana keterlibatan masyarakatnya hanya dalam proses tahap program perencanaan dan pelaksanaan.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan pada lingkup RW memiliki fokus kegiatan PIPPK meliputi infrastruktur, kebersihan, sosial ekonomi dan pemberdayaan. Jenis kegiatan PIPPK di dominasi oleh kegiatan pembangunan infrastruktur, berikut data diagram penjelasan terkait jenis kegiatan PIPPK. di Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon.

Gambar 1.1 Grafik Jenis Kegiatan PIPPK



Sumber data Kelurahan Cibuntu

Berdasarkan data diatas peneliti mengindikasikan bahwa fokus kegiatan PIPPK dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yaitu pada setiap tahapan programnya, terutama pada tahap pelaksanaan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam ruang lingkup kegiatan RW. Ruang lingkup jenis kegiatan pada bidang infrastruktur di Kelurahan Cibuntu meliputi kegiatan perbaikan /pemeliharaan jalan

lingkungan skala kecil RT/RW, perbaikan saluran air, perbaikan gorong-gorong, pembuatan septitank dan rehabilitasi kantor RW. Kegiatan tersebut dilaksanakan atas usulan masyarakat dan permasalahan lingkungan yang terjadi diwilayah masing masing.

Peneliti memilih salah satu kegiatan rehabilitasi gedung RW yang dilaksanakan di RW 07 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon. Pemilihan objek penelitian berdasarkan kegiatan yang menggambarkan banyaknya jumlah partisipan dan juga manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, karena tidak hanya pembangunan Kantor RW tetapi terdapat posyandu dan wc umum.

Dalam mewujudkan keberhasilan PIPPK terdapat beberapa indikator keberhasilan dan alur/ tahap program yang tertera pada juklak Perwal No 436 tahun 2015. Indikator keberhasilan tersebut itu akan memperlihatkan adanya partisipasi dan swadaya masyarakat yang seharusnya ada dalam setiap tahapan program PIPPK. Berikut adalah indikator keberhasilan PIPPK.⁴

- a. Memenuhi perencanaan yang partisipatif prioritas adalah masyarakat yang berada di wilayah kegiatan;
- b. Kegiatan bersifat Inovatif;
- c. Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- d. Manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat;⁷

⁷ Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung

Indikator keberhasilan diatas ditujukan kepada setiap kelurahan yang diberikan mandat oleh Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan dan menerapkan tahap-tahap, indikator keberhasilan dalam perwal terkait dan kesesuaian dengan bentuk tipe penyelenggaraan PIPPK sesuai dengan dinamika wilayah kelurahannya masing-masing. Beberapa kelurahan yang telah melaksanakan PIPPK sejak tahun 2015 mendapatkan apresiasi dari berbagai kategori pada tahun 2018. Salah satunya yaitu ketegori partisipasi yang diraih oleh Kelurahan Cibuntu.

Meskipun kelurahan Cibuntu telah mendapatkan apresiasi PIPPK *Awards* pada tahun 2018 di kategori partisipasi, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti masih terdapat indikasi pemasalahan terkait partisipasi di wilayah tersebut. Pemberian penghargaan kategori partisipasi yang diraih oleh Kelurahan Cibuntu ternyata belum berbasis pada indikator yang telah ditetapkan pada juklak dan juknis, sebab indikator pentingnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam tahap pelaksanaan PIPPK belum terpenuhi. Walaupun sudah mendapat apresiasi, ternyata kemungkinan rendahnya partisipasi dan hambatan partisipasi itu masih ada.

Berkaitan dengan tahap/alur dan indikator keberhasilan dalam PIPPK bentuk tipe I, masih terdapat beberapa masalah terkait dengan partisipasi masyarakat dalam tahapan program sebagai berikut :

1. Pada tahap perencanaan terdapat kegiatan Musrembang yaitu Musyawarah rencana pembangunan, pada tahap ini hanya saja perwakilan RT, RW, Kelurahan dan perwakilan tokoh masyarakat yang dilibatkan, selain itu sosialisasi program PIPPK yang kurang tersampaikan pada masyarakat, sehingga masyarakat kurang memahami konsep program PIPPK.
2. Pada tahap pelaksanaan kontribusi masyarakat tidak terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan dan kurangnya swadaya dalam bentuk tenaga, uang dan bahan material dalam pembangunan.

Secara lebih spesifik masih memiliki sejumlah hambatan partisipasi dan kendala pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya. Indikasi ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara pra penelitian dilapangan pada bulan maret dengan 5 orang masyarakat sebagai partisipan (penerima manfaat) di Kelurahan Cibuntu, bahwa masih terdapat indikasi masalah yang disimpulkan oleh peneliti dari hasil pra wawancara dan dapat simpulkan melalui poin- poin sebagai berikut:

1. Adanya ketidakmerataan informasi dari pihak kelurahan (pelaksana) kepada masyarakat (partisipan) yang mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang proses berjalannya kegiatan PIPPK sehingga mengakibatkan hambatan masyarakat untuk berpartisipasi.
2. Kontribusi atau swadaya partisipan dalam memberikan sumbangan dalam bentuk materil, uang, makanan dan tenaga masih terbatas dikarenakan

masyarakat masih beranggapan bahwa program ini sudah ada anggarannya, jadi masyarakat berpikiran untuk apalagi menyumbang.

3. Komitmen atau kebersamaan antar partisipan belum terwujud untuk terlibat langsung dalam suatu program pembangunan.⁸

Penjelasan di atas menunjukkan tiga indikasi utama hambatan partisipasi masyarakat yaitu ketidakmerataan informasi yang diperoleh oleh partisipan, keterbatasan swadaya masyarakat, dan komitmen atau kebersamaan antar partisipan yang belum terwujud. Berdasarkan temuan tersebut terdapat sebuah model penelitian yang relevan yang digunakan untuk mengetahui hambatan masyarakat ketika berpartisipasi. Berdasarkan temuan model partisipasi, model CLEAR berfokus pada hambatan partisipasi masyarakat sedangkan model lainnya berfokus kepada strategi, implementasi dan lain hal. Model tersebut memuat dimensi *can do* yang berisi tentang pemahaman informasi kelompok sasaran terhadap program serta kemampuan dan sumber daya yang dimiliki kelompok sasaran.

Berdasarkan pemaparan indikasi masalah dan latar belakang, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang mekanisme masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang berada di Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon dengan menggunakan model CLEAR.

⁸ Wawancara dengan Partisipan Masyarakat Program PIPPK, Tanggal 19/Maret/2021, Pukul 11.00, Di RW 07 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, penelitian yang akan dibahas yaitu terkait “Apa saja hambatan-hambatan partisipasi masyarakat pada Program Pembangunan Inovasi Pemberdayaan Kewilayahaan (PIPPK) di Kelurahan Cibuntu dengan menggunakan Model CLEAR?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjelaskan berbagai hambatan partisipasi masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan di Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang didapat baik secara teoritis maupun secara praktis, berikut jabarannya

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam penelitian yang berfokus pada hambatan partisipasi masyarakat pada implementasi program di sektor publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian terkait evaluasi program dari sudut pandang partisipasi masyarakat di Kelurahan Cibuntu, Kota Bandung pada program PIPPK.

1.4 Sistemika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA, membahas Program Sektor Publik, Partisipasi Program, Hambatan Partisipasi Program, Model CLEAR

BAB III METODE PENELITIAN, Tipe Penelitian, Peran Peneliti, Lokasi Penelitian, Prosedur Pengumpulan data, Analisis data, Keabsahan data dan Operasional Variabel

BAB IV PROFIL PENELITIAN, PIPPK, Definisi Konsep yang digunakan Dalam Program dan Profil Pengelola Program PIPPK

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, membahas lima dimensi *Can do, Like to, Enabled to, Asked to* dan *Responded to*

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, pembahasan Kesimpulan dan Saran.